



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6, Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7, Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI BANTEN TAHUN 2010.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
14. Harga Pasaran Umum, selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain agen tunggal pemegang merk, asosiasi penjualan kendaraan bermotor, importir dan sumber data lain yang sah.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai yang diperoleh berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
16. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
17. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II
KLASIFIKASI JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan klasifikasi jenis kendaraan bermotor, sebagai berikut :

- a. Jenis kendaraan bermotor :
 1. jenis kendaraan Penumpang Sedan;
 2. jenis kendaraan Penumpang Jeep;
 3. jenis kendaraan Penumpang Minibus;
 4. jenis kendaraan Mikrobus;
 5. jenis kendaraan Beban Pick Up dan sejenisnya;
 6. jenis kendaraan Beban Light Truck dan sejenisnya;
 7. jenis kendaraan Beban Truck dan sejenisnya;
 8. jenis kendaraan khusus Alat Berat/Besar;
 9. jenis kendaraan Sepeda Motor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga).
- b. Jenis kendaraan bermotor ubah bentuk, terdiri dari :
 1. Jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Pick Up;
 2. Jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Light Truck;
 3. Jenis kendaraan bermotor dengan bentuk dasar Truck.

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, jenis kendaraan bermotor ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian NJKB dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air adalah NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2009.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 5

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1 (satu); dan
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk :
 - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh prosen);
 - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh prosen);
 - c. kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh prosen);
 - d. kendaraan ambulans yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial ditetapkan sebesar 50% (lima puluh prosen), dan yang digunakan untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar 100% (seratus prosen).
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk :
 - a. kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh prosen);
 - b. kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh prosen);
 - c. kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar khusus penyerahan pertama ditetapkan sebesar 40% (empat puluh prosen);
 - d. kendaraan ambulans yang digunakan semata-mata untuk kepentingan sosial ditetapkan sebesar 50% dan digunakan untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar 100% (seratus prosen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang diatur pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh prosen).

Pasal 7

- (1) Kendaraan pemadam kebakaran tidak dikenakan PKB.
- (2) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan ambulans yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial ditetapkan masing-masing 50% (lima puluh prosen).
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan ambulans yang digunakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan komersil, ditetapkan 100% (seratus prosen).

BAB IV

KENDARAAN BERMOTOR UBAH FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor dapat diubah peruntukan dan fungsinya dari kondisi awal yang semula merupakan kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan tentang penetapan NJKB untuk menentukan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, meliputi kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Jenis, merek dan tipe belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh prosen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima prosen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
 1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan menambahkan 5% (lima prosen) dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. untuk tahun pembuatan lebih tua yang nilai jualnya belum tercantum, maka dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 5% (lima prosen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PKB atas kereta gandeng atau tempel ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari kendaraan bermotor penariknya.
- (2) Untuk tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, ditetapkan sesuai dengan HPU Provinsi Banten atau sesuai dengan NJKB yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan dan/atau tidak sesuai dengan HPU yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 Desember 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 24